

RENCANA KERJA

TAHUN 2024

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN

ACEH JAYA

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya telah rampung menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 bahwa untuk melaksanakan secara bertahap penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dengan memperhatikan seluruh aspek strategi penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh unit kerja Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) SKPK.

Perkembangan konsepsivitas penyusunan Rencana Kerja (Renja) akan sangat berpengaruh terhadap Program dan Kegiatan SKPK berdasarkan Renstra dan Program Tahunan SKPK, sebagai wujud pembelajaran dalam upaya meningkatkan kualitas Rencana Kerja (Renja) sebagaimana yang diharapkan, sehingga dapat memberikan hasil yang maksimal dan efektif serta transparan dalam melaksanakan pembangunan daerah.

Akhirnya kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten diharapkan lebih aktif dan motivatif dalam melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan target yang akan dicapai.

Semoga Rencana Kerja ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua dalam meningkatkan pembangunan daerah di Kabupaten Aceh Jaya. Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini kami menyadari masih banyak kekurangan maka kami sangat mengharapkan saran dan kritikan yang sifatnya membangun demi kesempurnaan dimasa yang akan datang.

Calang, 24 Juli 2023

 Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten
Aceh Jaya


SAFRUL MARYADI, SE.Ak, M.A.P

Pembina Utama Muda

Nip 19720327 200212 1 003

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan Renja Kerja	7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA BPKK TAHUN LALU	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKK Tahun Lalu dan Renstra Capaian BPKK.....	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan.....	19
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKK.	24
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal BPKK.....	27
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	48
BAB III TUJUAN DAN SASARAN RENJA BPKK.....	49
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	49
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BPKK	52
3.3 Program dan Kegiatan.....	53
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH JAYA.....	58
BAB V PENUTUP	70

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPK dan Pencapaian Renstra BPKK Aceh Jaya s/d Tahun 2022	10
TABEL 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah BPKK Aceh Jaya.....	23
TABEL 2.3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPK	29
TABEL 3.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023	53
TABEL 4.1	Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023.....	59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2024 merupakan rencana kerja tahunan sebagai penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Aceh Jaya Tahun 2024. Rencana Kerja (Renja) BPKK Aceh Jaya Tahun 2024 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Proses Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2024 tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Tahun 2024, agar didalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan Perundang-Undangan yang melatarbelakangi Penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPKK Aceh Jaya Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4179);

2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4463);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6402);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041)
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6056);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Presiden No 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang

- Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tentang Perubahan Atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 24. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 102);
 25. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 23);
 26. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026;
 27. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 13 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 16);
 28. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014-2034 (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014 Nomor 9);

29. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023 Nomor 4);
30. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 58);
31. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor 67);
32. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023-2026 (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2022 Nomor 10);
33. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023-2026 (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2022 Nomor 18);
34. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Tahun 2024 (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023 Nomor 17).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja BPKK Aceh Jaya Tahun 2024 adalah sebagai acuan arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan di BPKK Aceh Jaya.

1.3.2 Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja BPKK Aceh Jaya Tahun 2024 adalah agar dokumen perencanaan yang telah disusun dapat dijadikan sebagai acuan pelaksanaan pembangunan oleh BPKK sehingga dapat mewujudkan sinergitas antara dokumen perencanaan.

1.4 Sistematika Penulisan Rencana Kerja

Renja BPKK Aceh Jaya disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sistematika penyusunan Renja BPKK adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang landasan hukum; maksud dan tujuan; serta sistematika penulisan dalam penyusunan Renja.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BPKK TAHUN LALU

Memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKK Tahun Lalu dan Capaian Renstra BPKK; Analisis Kinerja Pelayanan BPKK; Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKK; Review Terhadap Rancangan Awal RKPK; dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPK

Memuat Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional; Tujuan dan Sasaran Renja BPKK; dan Program dan Kegiatan.

Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2024.

Bab IV PENUTUP

Berisi ringkasan singkat tentang acuan dasar dalam melaksanakan tugas, kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN KABUPATEN TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten

Secara umum Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya telah mampu merealisasikan secara maksimal seluruh target-target dari sasaran indikator kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2022. Dalam melaksanakan (merealisasikan) RKT 2022 yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya telah berhasil memenuhi sebahagian besar program dan kegiatan yang ada pada Tahun 2022.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2023

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023 s/d 2026	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja SKPK Tahun 2022	Realisasi Renja SKPK Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5 02 01	Program Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai saki	Nilai	Nilai						
5 02 01 2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan dan Dokumen Kinerja Perangkat Daerah</i>								
5 02 01 2.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dok	2 dok	1 dok	1 dok	100	2 dok	2.00 dok	50.00%
5 02 01 2.01 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 lap	4 lap	1 lap	1 lap	100	1 lap	1 lap	25.00%
5 02 01 2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan</i>								
5 02 01 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 org	68 org	70 org	66 org	94.29	72.00 org	68 org	94.44%
5 02 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 lap	4 lap	1 lap	1 lap	100	1 lap	1 lap	25.00%
5 02 01 2.05	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah ASN yang ditingkatkan Kompetensinya</i>								
5 02 01 2.05 11	imbangan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	14 org	org	1 org	1 org	100	3 org	3 org	21.43%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023 s/d 2026	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja SKPK Tahun 2022	Realisasi Renja SKPK Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10	11=(10/4)
5 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
5 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket	1 paket	25.00%
5 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	4 paket	2 paket	2 paket	100	4 paket	4 paket	100.00%
5 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 paket	4 paket	4 paket	4 paket	100	1 paket	1 paket	5.00%
5 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	16 paket	4 paket	2 paket	2 paket	100	1 paket	1 paket	6.25%
5 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 dok	4 dok	1 dok	1 dok	100	1 dok	1 dok	25.00%
5 02 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 lap	4 lap	1 lap	1 lap	100	1 lap	1 lap	25.00%
5 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 lap	4 lap	1 lap	1 lap	100	1 lap	1 lap	25.00%
5 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
5 02 01 2.07 5	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 unit	unit	unit	unit		1 unit	1 unit	25.00%
5 02 01 2.07 9	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	17 unit	20 unit	13 unit	13 unit	100	3 unit	3 unit	17.65%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023 s/d 2026	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja SKPK Tahun 2022	Realisasi Renja SKPK Tahun 2022	Tingkat Realisasi		8= (7/6)	9
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10	11=(10/4)
5 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
5 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 lap	1 lap	1 lap	1 lap	100	1 lap	1 lap	25.00%
5 2 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
5 2 01 2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 unit	4 unit	4 unit	4 unit	100	2 unit	2 unit	25.00%
5 02 01 2.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 unit	9 unit	9 unit	12 unit	133.33	5 unit	5 unit	16.13%
5 02 01 2.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	105 unit	54 unit	10 unit	10 unit	100	25 unit	25 unit	23.81%
5 02 01 2.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	7 unit	1 unit	1 unit	100	1 unit	1 unit	25.00%
5 02 02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan Waktu Penetapan APBK								
5 02 02 2.01	<i>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</i>	<i>Tersedianya Dokumen Penyusunan Rencana Anggaran</i>								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023 s/d 2026	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja SKPK Tahun 2022	Realisasi Renja SKPK Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10	11=(10/4)
5 02 02 2.01 1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	8 dok	2 dok	2 dok	2 dok	100	2 dok	2 dok	25.00%
5 02 02 2.01 2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	8 dok	2 dok	2 dok	2 dok	100	2 dok	2 dok	25.00%
5 02 02 2.01 3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	176 dok	44 dok	44 dok	44 dok	100	44 dok	44 dok	25.00%
5 02 02 2.01 4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	176 dok	44 dok	44 dok	44 dok	100	44 dok	44 dok	25.00%
5 02 02 2.01 5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	176 dok	44 dok	44 dok	44 dok	100	44 dok	44 dok	25.00%
5 02 02 2.01 6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	176 dok	44 dok	44 dok	44 dok	100	44 dok	44 dok	25.00%
5 02 02 2.01 7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	8 dok	15 dok	5 dok	5 dok	100	2 dok	2 dok	25.00%
5 02 02 2.01 8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	8 dok	20 dok	5 dok	5 dok	100	2 dok	2 dok	25.00%
5 02 02 2.01 9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	4 dok	4 dok	1 dok	1 dok	100	1 dok	1 dok	25.00%
5 02 02 2.01 10	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	33 org	33 org	33 org	33 org	100	33 org	33 org	100.00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023 s/d 2026	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja SKPK Tahun 2022	Realisasi Renja SKPK Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10	11=(10/4)
5 02 02 2.02 05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	27 dok	9 dok	9 dok	9 dok	100	1 dok	1 dok	3.70%
5 02 02 2.02 10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	15 dok	3 dok	2 dok	2 dok	100	2 dok	2 dok	13.33%
5 02 02 2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tersedianya Perda tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK								
5 02 02 2.03 05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	24 dok	18 dok	6 dok	6 dok	100	6 dok	6 dok	25.00%
5 02 02 2.03 09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	4 dok	2 dok	1 dok	1 dok	100	1 dok	1 dok	25.00%
5 02 02 2.03	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	4 dok	- dok	1 dok	1 dok	100	1 dok	1 dok	25.00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023 s/d 2026	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja SKPK Tahun 2022	Realisasi Renja SKPK Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10	11=(10/4)
5 02 02 2.03	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	43 org	- org	org	org		43 org	43 org	100.00%
5 02 02 2.04	<i>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</i>	<i>Persentase penyaluran dana transfer kepada pemerintah desa yang sesuai perundang-undangan yang berlaku</i>								
5 02 02 2.04 08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	4 lap	3 lap	1 lap	1 lap	100	4 lap	4 lap	100.00%
5 02 02 2.04 09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	4 lap	- lap	1 lap	1 lap	100	1 lap	1 lap	25.00%
5 02 02 2.04 10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	4 lap	- lap	1 lap	1 lap	100	2 lap	2 lap	50.00%
5 02 02 2.05	<i>Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Implementasi dan Pemeliharaan SIPD</i>								
5 02 02 2.05 02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	4 dok	- dok	1 dok	1 dok	100	1 dok	1 dok	25.00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023 s/d 2026	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja SKPK Tahun 2022	Realisasi Renja SKPK Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10	11=(10/4)
5 02 3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP						
5 02 3 2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya pengawasan dan pengendalian atas penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah								
5 02 3 2.01 01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	4 dok	3 dok	1 dok	1 dok	100	1 dok	1 dok	25.00%
5 02 3 2.01 03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	4 lap	1 lap	1 lap	1 lap	100	1 lap	1 lap	25.00%
5 02 3 2.01 04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	9 lap	1 lap	1 lap	1 lap	100	1 lap	1 lap	11.11%
5 02 3 2.01 06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	4 lap	2 lap	1 lap	1 lap	100	1 lap	1 lap	25.00%
5 02 3 2.01 07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	273 lap	50 lap	50 lap	50 lap	100	50 lap	50 lap	18.32%
5 02 3 2.01 08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	18 lap	2 lap	1 lap	1 lap	100	1 lap	1 lap	5.56%
5 02 3 2.01 09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	160 lap	40 lap	40 lap	40 lap	100	40 lap	40 lap	25.00%
5 02 3 2.01 10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	100 dok	100 dok	100 dok	100 dok	100	100 dok	100 dok	100.00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023 s/d 2026	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja SKPK Tahun 2022	Realisasi Renja SKPK Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10	11=(10/4)
5 02 3 2.01 11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	12 lap	4 lap	3 lap	3 lap	100	3 lap	3 lap	25.00%
5 02 4	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Aceh Jaya								
5 02 4 2.01	<i>Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah</i>	<i>Meningkatnya sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah</i>								
5 02 4 2.01 02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	4 lap	4 lap	1 lap	1 lap	100	1 lap	1 lap	25.00%
5 02 4 2.01 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	8 lap	lap	1 lap	1 lap	100	2 lap	2 lap	25.00%
5 02 4 2.01 04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	8 unit	unit	- unit	- unit	-	2 unit	2 unit	25.00%
5 02 4 2.01 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	8 lap	1 lap	1 lap	1 lap	100	2 lap	2 lap	25.00%
5 02 4 2.01 06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	8 lap	1 lap	1 lap	1 lap	100	2 lap	2 lap	25.00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023 s/d 2026	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja SKPK Tahun 2022	Realisasi Renja SKPK Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10	11=(10/4)
5 02 4 2.01 07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOPnya	8 OP	1 OP	1 OP	1 OP	100	2 OP	2 OP	25.00%
5 02 4 2.01 08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	4 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100	1 dok	1 dok	25.00%
5 02 04 2.01 11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	8 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100	1 dok	1 dok	12.50%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Pada tahun 2024 mendatang Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya akan berusaha terus untuk meningkatkan PAD, penatausahaan keuangan, pelaporan dan pengelolaan aset secara cepat, tepat dan akuntabel sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPKK yaitu melaksanakan urusan umum pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan, Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten terus berbenah diri bersama BAPPEDA dan telah berusaha merencanakan dan berupaya APBK ditetapkan tepat waktu (sebelum 31 Desember), meningkatkan pelayanan pencairan dana (SP2D). Pelayanan perpajakan kepada masyarakat terutama dalam pengurusan NPWPD, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, PBB dan BPHTB yang cepat dan tepat waktu. Kondisi yang diinginkan sebagai penentu keberhasilan pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kinerja aparatur secara profesional.
2. Meningkatnya kualitas laporan kinerja dan keuangan OPD yang berbasis aktual.
3. Tersedianya Sistem Informasi yang baik dan dapat melayani kebutuhan pengelolaan keuangan dan aset daerah secara online.
4. Peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah serta penerimaan lainnya secara optimal melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.
5. Peningkatan pengadaan sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung pengelolaan pendapatan daerah
6. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban selaku warga negara untuk membayar pajak dan retribusi daerah.
7. Adanya kemauan dari semua unsur untuk berbuat dan memikirkan upaya peningkatan penerimaan PAD.

8. Tersedianya peraturan perundang-undangan yang akurat dan sesuai dengan perkembangan zaman

9. Tersedianya kondisi yang kondusif dalam kehidupan bermasyarakat.

Secara umum target pelayanan pada BPKK dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok yaitu :

1. Unsur pimpinan (Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah) yaitu tentang perencanaan dengan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.
2. OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yaitu terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, pencairan dana kegiatan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan barang milik daerah.
3. Pemangku kepentingan dalam hal pembahasan anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.
4. Masyarakat yaitu dalam memberikan pelayanan pembayaran pajak PBB, BPHTB, hotel, restoran, reklame, parkir dan retribusi pemakaian kekayaan daerah.

Dalam upaya menjalankan amanah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat serta peran dalam melaksanakan urusan umum pemerintahan di bidang keuangan, terdapat beberapa permasalahan yaitu :

1. Rendahnya pertumbuhan penerimaan daerah dari sektor Retribusi.
2. Masih rendahnya penyerapan belanja daerah.
3. Kurang sinerginya perencanaan dan penganggaran.
4. Pengguna dan pengurus barang milik daerah belum sepenuhnya disiplin dalam melakukan penatausahaan dan pengelolaan aset tetap secara baik.
5. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Daerah.
6. Masih banyaknya wajib pajak yang belum memotong/cash langsung pajak daerah pada penerimaan Pembayaran atas layanan Pajak Restoran.
7. Masih terbatasnya petugas pajak daerah.

8. Masih ada pengusaha restoran yang belum menggunakan mesin cash register sehingga menyulitkan petugas dalam pemeriksaan pelaporan pajak daerah.
9. Belum adanya PPNS khusus perpajakan daerah.
10. Belum optimalnya sosialisasi PDRD kepada masyarakat.
11. Masih lemahnya sanksi hukum yang diatur dalam Qanun Pajak Daerah.

Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dan mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Aceh Jaya. Sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten mempunyai tugas pokok merumuskan, menyelenggarakan, membina, mengevaluasi dan melaksanakan fungsi penunjang keuangan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Untuk penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, anggaran, aset, akuntansi dan perbendaharaan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan, anggaran, aset, akuntansi, dan perbendaharaan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendapatan, anggaran, aset, akuntansi dan perbendaharaan;
- d. Pembinaan UPTB; dan

e. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati dan atau Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Dari uraian tugas pokok dan fungsi tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten memiliki tugas yang cukup strategis dalam merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Pengkoordinasian penyusunan Rancangan Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) dan Perubahannya serta Laporan Pertanggungjawaban APBK. Disamping itu, Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten juga mempunyai tugas untuk merumuskan perencanaan belanja, pengelolaan keuangan daerah serta penyelenggaraan perbendaharaan umum daerah. Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten terhadap 3 indikator kinerja tercantum pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Nilai SAKIP BPKK			67,35	68,35	69,35	70,35	67,35	68,35	69,35	70,35	
2.	Opini BPK			WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah			-	B	A	A	-	B	A	A	
3.	Rasio PAD			2,49	3,84	4,00	4,10	2,49	8,46	4,00	4,10	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggara Tugas dan Fungsi BPKK

Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya. Perubahan lingkungan strategis baik yang dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal akan berdampak pada pelaksanaan peran Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya untuk tahun 2023 – 2026.

Pelaksanaan tugas dan fungsi BPKK selaku salah satu Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) yang juga merangkap sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) menghadapi berbagai permasalahan, antara lain yaitu:

- a. Regulasi di bidang pengelolaan keuangan yang sangat dinamis sehingga memerlukan penyesuaian dalam implementasinya;
- b. Kompetensi dan kualitas SDM terbatas;
- c. Prasarana gedung kantor yang kurang memadai;
- d. Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang belum optimal;
- e. Belum seluruhnya proses operasional memiliki prosedur operasional baku (*Standar Operating Procedure*);
- f. Advokasi dan verifikasi penyusunan RKA-SKPK yang masih kurang optimal sehingga berimbas pada konsistensi dan sinkronisasi APBK dengan dokumen perencanaan daerah;
- g. Pemahaman aparatur pengelola keuangan daerah yang belum menyeluruh akan Sistem Akuntansi Pemerintah;
- h. Pengembangan aset belum seluruhnya diatribusikan ke aset induk;
- i. Belum seluruhnya dilakukan pendataan ulang terhadap WP PBB P2;
- j. Belum adanya data base WP dan WR;
- k. Dokumen pengelolaan keuangan yang belum tertata karena kurangnya dukungan sarana-prasarana pengelolaan arsip;
- l. Koordinasi lintas pelaku yang masih lemah di bidang pengelolaan keuangan daerah;

m. Komitmen dan konsistensi kebijakan di bidang pengelolaan keuangan daerah yang masih belum cukup; dan

n. Kurangnya komitmen pimpinan SKPK terhadap kebijakan pengelolaan keuangan daerah;

Adapun yang menjadi tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya adalah sebagai berikut:

a. Peluang

1. Adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi termasuk pelimpahan kewenangan untuk menetapkan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah;
2. Hubungan kerja dengan instansi terkait dan stakeholder telah terjalin dengan baik;
3. Adanya kesamaan pandangan dan pemahaman dari segenap aparatur pengelola keuangan seluruh perangkat daerah dalam rangka kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang keuangan dan aset/barang daerah;
4. Adanya dukungan baik dari pimpinan Eksekutif maupun pihak Legislatif;
5. Potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah tersedia;
6. Sistem informasi pengelolaan keuangan lebih memudahkan dan membantu dalam perencanaan penganggaran, penatausahaan dan penyusunan laporan keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
7. Kualitas dan kapabilitas SDM pengelola keuangan dan aset yang masih bisa dikembangkan.

b. Tantangan

1. Kurang optimalnya sistem pengawasan pendapatan, sedangkan kesadaran masyarakat dalam pemenuhan kewajiban relatif rendah;
2. Adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang sehat dan *good governance*;
3. Kurangnya kemampuan SDM pengelola keuangan dan aset/barang daerah di perangkat daerah dalam melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar, sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah SKPK;
4. Pengawasan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan semakin ketat dan meningkatnya intensitas;
5. Masih adanya aset di SKPK yang belum dioptimalkan;
6. Keterbatasan penyediaan dana untuk prioritas pembangunan yang berkesinambungan;
7. Akurasi data dan ketepatan waktu pencairan anggaran program/kegiatan;
8. Adanya tanah milik daerah namun bangunan di atasnya merupakan bangunan yang dibangun dari sumber pembiayaan diluar APBD dan belum diserahkan ke daerah;
9. Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual;
10. Adanya aset pusat yang pengelolaannya oleh daerah, namun belum diserahkan terimakan kepada pemerintah daerah;
11. Pelaksanaan e-audit dalam pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK ;
dan
12. Pengintegrasian sistem aplikasi pengelolaan keuangan dengan aset.

Berdasarkan hal tersebut diperkirakan akan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah ke depan, perlu dikembangkan upaya tindak lanjut sebagai berikut:

- a. Pengkajian dan penyempurnaan produk hukum daerah yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah;
- b. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur guna menunjang pelaksanaan keseluruhan proses pengelolaan keuangan daerah;
- c. Optimalisasi sistem informasi yang ada untuk mendukung penerapan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah;
- d. Peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi baik secara horizontal maupun vertical;
- e. Peningkatan fungsi staf sebagai dukungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi meliputi pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana serta aset dinas.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPK

Perkembangan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya, pada dasarnya sudah terlaksana dengan baik, namun akibat keterbatasan dana dan anggaran yang tersedia tidak semua program dan kegiatan yang tercantum dalam rancangan awal rencana kerja pemerintah kabupaten (RKPK) dapat terealisasi.

Telaahan terhadap rancangan awal RKPK dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPK dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPK, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPK berdasarkan rancangan awal RKPK.

Review terhadap rancangan awal RKPK, meliputi identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan awal Renja BPKK ini dilakukan dengan fokus pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPK, evaluasi pelaksanaan Renja BPKK tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra BPKK. Perumusan rancangan awal Renja BPKK dilakukan melalui serangkaian kegiatan pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan pada BPKK, mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja BPKK tahun lalu berdasarkan Renstra BPKK, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BPKK, telaahan terhadap rancangan awal RPKK, perumusan tujuan dan sasaran, penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat, perumusan kegiatan prioritas, penyajian awal dokumen rancangan Renja BPKK, penyempurnaan rancangan Renja BPKK, pembahasan forum SKPK, dan penyesuaian dokumen rancangan Renja Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, arahan menteri terkait dan SPM. Dalam prosesnya juga diperbandingkan antara program-program yang sudah dituangkan dalam RPKK dengan hasil analisa kebutuhan yang didasarkan pada plafon dan prioritas anggaran. Hasil review terhadap rancangan awal RPKK Tahun 2024 tercantum pada tabel 2.3.

Tabel 2.3
Revie terhadap rancangan awal RKPK Tahun 2024
BPKK Aceh Jaya

No	Rancangan Awal RKPK					Hasil Analisa Kebutuhan					Catt
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Persentase Capaian Kinerja dan Keuangan SKPK			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Persentase Capaian Kinerja dan Keuangan SKPK			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan, Dokumen Anggaran dan Dokumen Evaluasi Kinerja			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. A. Jaya	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dok	5.010.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. A. Jaya	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dok	4.927.200	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. A. Jaya	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Lap	5.010.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. A. Jaya	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Lap	4.948.300	

No	Rancangan Awal RPKK					Hasil Analisa Kebutuhan					Catt.
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. A. Jaya	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 Orang	7.865.003.633	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. A. Jaya	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 Orang	9.021.558.486	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. A. Jaya	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	1 Lap	30.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. A. Jaya	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPK	1 Lap	29.613.400	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah ASN yang ditingkatkan Kompetensinya			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah ASN yang ditingkatkan Kompetensinya			

No	Rancangan Awal RKPK					Hasil Analisa Kebutuhan					Catt.
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 orang	20.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. A. Jaya	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 orang	20.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					Administrasi Umum Perangkat Daerah					
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. A. Jaya	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.985.046	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. A. Jaya	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.984.800	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. A. Jaya	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	247.869.792	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. A. Jaya	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	223.550.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. A. Jaya	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. A. Jaya	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	64.075.200	

No	Rancangan Awal RPKK					Hasil Analisa Kebutuhan					Catt.
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. A. Jaya	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	42.500.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. A. Jaya	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	40.796.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. A. Jaya	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dok	1.123.632	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. A. Jaya	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dok	1.080.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. A. Jaya	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Lap	23.772.300	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. A. Jaya	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Lap	23.770.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. A. Jaya	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Lap	246.413.640	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. A. Jaya	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Lap	246.413.640	

No	Rancangan Awal RPK					Hasil Analisa Kebutuhan					Catt
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. A. Jaya				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. A. Jaya				
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		125.000.000	
	Pengadaan Mebel	Kab. A. Jaya	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket	285.000.000	Pengadaan Mebel	Kab. A. Jaya	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket	37.806.650	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. A. Jaya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	64.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. A. Jaya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	100.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Kab. A. Jaya				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Kab. A. Jaya				

No	Rancangan Awal RPKK					Hasil Analisa Kebutuhan					Catt
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. A. Jaya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Lap	498.249.220	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. A. Jaya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Lap	179.094.364	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. A. Jaya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lap	703.328.428	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. A. Jaya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lap	17.253.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					

No	Rancangan Awal RKPK					Hasil Analisa Kebutuhan					Catt
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. A. Jaya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 unit	22.159.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. A. Jaya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 unit	124.599.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. A. Jaya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	86.233.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. A. Jaya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	192.396.600	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. A. Jaya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 unit	104.039.750	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. A. Jaya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 unit	42.570.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. A. Jaya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	365.500.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. A. Jaya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	219.091.840	

No	Rancangan Awal RPKK					Hasil Analisa Kebutuhan					Catt.
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah			
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Jumlah Dokumen Penyusunan Anggaran			Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Jumlah Dokumen Penyusunan Anggaran			
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kab. A. Jaya	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dok	85.341.200	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kab. A. Jaya	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dok	85.339.100	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab. A. Jaya	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dok	85.362.200	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab. A. Jaya	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dok	85.347.900	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Kab. A. Jaya	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	44 Dok	52.912.600	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Kab. A. Jaya	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	44 Dok	48.840.800	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Kab. A. Jaya	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	44 Dok	36.020.800	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Kab. A. Jaya	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	44 Dok	42.618.100	

No	Rancangan Awal RPKK					Hasil Analisa Kebutuhan					Catt.
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Kab. A. Jaya	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	44 Dok	52.912.600	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Kab. A. Jaya	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	44 Dok	49.839.100	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Kab. A. Jaya	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	44 Dok	36.020.800	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Kab. A. Jaya	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	44 Dok	40.921.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kab. A. Jaya	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dok	195.895.800	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kab. A. Jaya	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dok	215.540.800	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kab. A. Jaya	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dok	210.537.400	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kab. A. Jaya	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dok	241.558.600	

No	Rancangan Awal RKPK					Hasil Analisa Kebutuhan					Catt.
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kab. A. Jaya	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dok	26.835.400	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kab. A. Jaya	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dok	95.141.500	
	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. A. Jaya	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	33 Orang	616.499.200	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. A. Jaya	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	33 Orang	632.317.850	
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kab. A. Jaya				Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah					
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kab. A. Jaya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	11620 Dok	112.999.000	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kab. A. Jaya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	11620 Dok	137.930.300	

No	Rancangan Awal RKPK					Hasil Analisa Kebutuhan					Catt.
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kab. A. Jaya	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	728 Dok	24.998.700	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kab. A. Jaya	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	728 Dok	24.991.700	
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kab. A. Jaya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1 Dok	58.465.900	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kab. A. Jaya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1 Dok	48.880.800	
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan		Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan	50 Dok	60.700.000	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan	Kab. A. Jaya	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta	50 Dok	60.598.600	

No	Rancangan Awal RPKK					Hasil Analisa Kebutuhan					Catt.
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
	Pertanggungjawaban Sub Kegiatan		Pertanggungjawaban Sub Kegiatan			Pertanggungjawaban Sub Kegiatan		Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan			
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah					Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah					
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kab. A. Jaya	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota	6 Dok	213.239.500	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kab. A. Jaya	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	6 Dok	262.748.900	

No	Rancangan Awal RPKK					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)
	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kab. A. Jaya	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dok	15.000.000	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kab. A. Jaya	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dok	14.997.800
	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. A. Jaya	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dok	7.000.000	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah		Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dok	6.990.100
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. A. Jaya	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota	43 Orang	5.337.398	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	43 Orang	5.304.000
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah					Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				

No	Rancangan Awal RPKK					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kab. A. Jaya	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	4 Lap	179.807.842.400	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kab. A. Jaya	Jumlah laporan/disalurkannya Bantuan Keuangan Khusus	4 Lap	161.958.494.500
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kab. A. Jaya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Lap	1.500.000.000	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kab. A. Jaya	Terlaksananya belanja darurat dan mendesak	1 Lap	3.000.000.000
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Kab. A. Jaya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	2 Lap	889.194.535	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Kab. A. Jaya	Belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintahan desa dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah	2 Lap	783.956.971
3	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		Jumlah Dokumen Implementasi dan Pemeliharaan SIPD			Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah				
	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Kab. A. Jaya	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dok	72.000.000	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dok	72.000.000

No	Rancangan Awal RKPK					Hasil Analisa Kebutuhan					Catt
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kab. A. Jaya				PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. A. Jaya				Pengelolaan Barang Milik Daerah					
	Penyusunan Standar Harga	Kab. A. Jaya	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dok	53.174.400	Penyusunan Standar Harga	Kab. A. Jaya	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dok	64.625.200	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab. A. Jaya	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Lap	14.750.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab. A. Jaya	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Lap	12.232.500	
	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. A. Jaya	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Lap	17.749.200	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. A. Jaya	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Lap	12.970.600	
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kab. A. Jaya	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Lap	339.998.400	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kab. A. Jaya	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Lap	23.078.100	

No	Rancangan Awal RPKK					Hasil Analisa Kebutuhan					Catt
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kab. A. Jaya	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	50 Lap	444.499.400	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kab. A. Jaya	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	50 Lap	108.141.200	
	Penilaian Barang Milik Daerah	Kab. A. Jaya	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Lap	39.939.800	Penilaian Barang Milik Daerah	Kab. A. Jaya	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Lap	39.927.800	
	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. A. Jaya	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	40 Lap	29.749.000	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. A. Jaya	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	40 Lap	20.408.000	

No	Rancangan Awal RKPK					Hasil Analisa Kebutuhan					Catt
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kab. A. Jaya	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	100 Dok	24.749.700	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kab. A. Jaya	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	100 Dok	19.449.700	
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab. A. Jaya	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	3 Lap	36.748.400	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab. A. Jaya	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	3 Lap	9.748.400	
4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kab. A. Jaya				PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Kab. A. Jaya				Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah					

No	Rancangan Awal RKPK					Hasil Analisa Kebutuhan					Catt
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Kab. A. Jaya	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dok	45.000.000	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Kab. A. Jaya	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dok	34.999.700	
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. A. Jaya	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Lap	20.000.000	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Lap	20.006.300	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. A. Jaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah yang Disediakan	2 Unit	15.000.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah yang Disediakan	2 Unit	21.250.000	
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kab. A. Jaya	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Lap	50.000.000	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kab. A. Jaya	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Lap	35.000.000	
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kab. A. Jaya	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	2 Lap	34.983.500	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kab. A. Jaya	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	2 Lap	37.989.200	

No	Rancangan Awal RKPK					Hasil Analisa Kebutuhan					Catt
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kab. A. Jaya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOPnya	362 OP	140.000.000	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kab. A. Jaya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOPnya	362 OP	102.539.800	
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kab. A. Jaya	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1 Dok	30.000.000	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kab. A. Jaya	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1 Dok	38.267.700	
	Penagihan Pajak Daerah	Kab. A. Jaya	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	2 Dok	51.000.000	Penagihan Pajak Daerah	Kab. A. Jaya	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	2 Dok	20.002.800	

Dari tabel diatas disimpulkan bahwa pembandingan antara program/kegiatan, lokasi indikator, target dan pagu indikatif Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023 telah sesuai dan dapat mengakomodir program/kegiatan, lokasi, indikator, target dan kebutuhan anggaran BPKK Aceh Jaya tahun 2023 dalam program pembangunan Aceh Jaya sesuai dengan tugas dan fungsi. Adapun besaran pagu yang berubah dari rancangan awal dikarenakan ada jenis-jenis belanja yang harus disesuaikan seperti honorarium dalam sub kegiatan dan belanja yang berdampak dengan aturan outsourcing.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya juga menampung usulan dari pemangku kepentingan yaitu Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRK yang merupakan aspirasi masyarakat yang dititipkan kepada anggota Dewan agar diperjuangkan di pembahasan RAPBK.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
BPKK Aceh Jaya

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				
	Bantuan keuangan khusus kepada pemerintah desa	Kab. Aceh Jaya, Sebagian Kecamatan	Jml Gampong	47 Gampong	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPK

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Merencanakan suatu pembangunan harus terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah dalam sistem pembangunan nasional. Hal ini untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, pengoptimalan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Pemerintah mempunyai tujuh agenda prioritas yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Dari tujuh sasaran pokok pembangunan nasional, yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten adalah sasaran ketujuh yaitu memperkuat stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan publik. Upaya yang dilakukan untuk transformasi pelayanan publik adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan layanan atau *e-services*, serta penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja

pelayanan serta penguatan ekosistem inovasi pelayanan publik dan penguatan pelayanan terpadu atau terintegrasi .

Program Prioritas Pembangunan Provinsi yang selaras dengan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya adalah Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Keistimewaan Aceh sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026.

Adapun Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 13 Tahun 2013 tentang RPJP Aceh Jaya tahun 2005-2025, dimana saat ini memasuki Tahapan Pembangunan Ke-4 (2020-2025), yang merupakan rangkaian akhir tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Jaya yang diharapkan pada akhir periode ini akan terwujud Kabupaten Aceh Jaya yang maju dengan masyarakat yang sejahtera, berkualitas dan bertaqwa dalam tatanan pemerintah yang baik. Adapun prioritas pembangunan RPJM Aceh yang searah dengan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya adalah peningkatan kualitas SDM dalam upaya optimalisasi penguasaan dan pengembangan teknologi tepat guna, teknologi informasi dan komunikasi.

Dengan demikian, arah kebijakan umum pembangunan Aceh Jaya tetap menjaga kesinambungan pembangunan daerah dengan memperhatikan hasil capaian kinerja pada pelaksanaan pembangunan daerah periode sebelumnya, juga memperhatikan arah kebijakan dan prioritas nasional dan Aceh serta menyikapi dinamika kebijakan pembangunan nasional dan Aceh, maka dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan intensifikasi, ekstensifikasi dan peningkatan regulasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Meningkatkan keterkaitan dan keserasian pembangunan antar sektor, wilayah serta pelaku pembangunan secara lebih terpadu dan berkesinambungan berbasis pengembangan potensi kawasan strategis

dan cepat tumbuh sebagai upaya untuk memantapkan kesiapan dalam implementasi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA);

3. Keterpaduan langkah strategis sebagai upaya pemantapan pelaksanaan MEA melalui penguatan usaha skala kecil dan menengah, penguatan kemitraan dengan sektor swasta, fasilitasi dalam standarisasi produk UMKM dan IKM, membangun strategi untuk lebih meningkatkan investasi dengan menyederhanakan perizinan, pelayanan terpadu satu pintu, hubungan industrial dan promosi;
4. Perwujudan program dan kegiatan sesuai kewenangan melalui strategi pembangunan yang pro poor, pro job, pro growth dan pro environment dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat;
5. Optimalisasi pendayagunaan potensi kewilayahan dengan mengedepankan optimalisasi tata kelola produk unggulan masing-masing kecamatan untuk mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah;
6. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui peningkatan kesehatan rohani dan jasmani, kualitas sanitasi lingkungan pemukiman dan sarana umum lainnya;
7. Mewujudkan kemandirian gampong melalui peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan gampong dan pengembangan ekonomi pedesaan;
8. Meningkatkan pembangunan gampong melalui sinergitas perencanaan pembangunan gampong dan kabupaten;
9. Percepatan pembangunan infrastruktur daerah yang tangguh, terintegrasi dan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
10. Mengimplementasikan pencapaian sasaran Standar Pelayanan Minimum (SPM) pada urusan kewenangan wajib yang telah ditetapkan oleh kementerian sesuai dengan kewenangan kabupaten;
11. Meningkatkan kualitas kinerja pemerintah daerah melalui percepatan reformasi birokrasi, peningkatan kualitas kinerja SKPK dengan penerapan

Standarisasi Operasional Prosedur (SOP) pada masing-masing bidang pekerjaan dan peningkatan kualitas belanja daerah agar lebih efektif dan efisien yang berprinsip pada anggaran yang berbasis kinerja;

12. Meningkatkan konsistensi perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah;
13. Memberikan kesempatan pendidikan dan meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, daya saing, dan penyediaan sarana dan prasarana sekolah yang mendukung peningkatan mutu;
14. Penguatan nilai-nilai keagamaan untuk mendukung pelaksanaan syariat Islam dan keistimewaan Aceh;
15. Pengembangan pembangunan kepemudaan dan olahraga melalui upaya peningkatan peran pemuda, meningkatkan jiwa kewirausahaan dalam pembangunan serta mencegah penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
16. Meningkatkan kompetensi dan kesempatan kerja serta pengembangan kawasan transmigrasi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten

Berdasarkan prioritas dan tahapan pembangunan periode ke-4 sebagaimana yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023 – 2026 serta dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis yang berkembang maka tujuan yang ingin dicapai BPKK Aceh Jaya adalah mewujudkan reformasi birokrasi.

Yang menjadi sasaran Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Tahun 2023-2026 sesuai yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023-2026 adalah: 1). Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi; dan 2). Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi

Penjabaran dari tujuan secara lebih spesifik dan terukur dirumuskan ke dalam sasaran. Sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah

tindakan dan alokasi sumber daya organisasi. Oleh karena itu, sasaran harus lebih fokus, bersifat spesifik, terinci dan dapat diukur.

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka melaksanakan suatu rencana. Program Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten merupakan langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana yang diuraikan dalam Renstra terdiri dari 4 (empat) program, 14 (empat belas) kegiatan dan 60 (enam puluh) sub kegiatan dengan usulan anggaran sebesar Rp. 177.316.563.267,-. Rincian program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Program ini mengusulkan anggaran sebesar Rp. 7.528.633.307,-. Kegiatannya yaitu:

- 1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari 2 sub kegiatan:
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari 2 sub kegiatan:
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 2. Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari 7 sub kegiatan:
 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik
 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 6. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari 3 sub kegiatan:
1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 2. Pengadaan Mebel
 3. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan, dengan kegiatan:
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 4 sub kegiatan:
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- b) Program Pengelolaan Keuangan Daerah.
Program ini mengusulkan anggaran sebesar Rp. 169.281.879.565,-.
Kegiatannya yaitu:
- 1) Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, terdiri dari 10 sub kegiatan:
 1. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
 2. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
 3. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
 4. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
 5. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD

6. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
 7. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
 8. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
 9. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
 10. Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
- 2) Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, terdiri dari 4 sub kegiatan:
1. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
 2. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
 3. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
 4. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
- 3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, terdiri dari 4 sub kegiatan:
1. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
 2. Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah

3. Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
 4. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
- 4) Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri dari 3 sub kegiatan:
1. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
 2. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
 3. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota
- 5) Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah, dengan kegiatan:
1. Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah
- c) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Program ini mengusulkan anggaran sebesar Rp.229.762.000,-, yaitu kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari 9 sub kegiatan:
1. Penyusunan Standar Harga
 2. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
 3. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - 4 Inventarisasi Barang Milik Daerah
 5. Pengamanan Barang Milik Daerah
 6. Penilaian Barang Milik Daerah
 7. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
 8. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
 9. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
- d) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
- Program ini mengusulkan anggaran sebesar Rp. 276.288.395,-, melalui Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, terdiri dari 8 sub kegiatan:

1. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.
2. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
3. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
4. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
5. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
6. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
7. Penetapan Wajib Pajak Daerah
8. Penagihan Pajak Daerah

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN KABUPATEN ACEH JAYA

Pendanaan program dan kegiatan BPKK merupakan cara penyusunan pendanaan perumusan prioritas serta penghitungan alokasi untuk masing-masing program. Setiap program dan kegiatan ditetapkan target capaian pada setiap tahun. Untuk mencapai target tersebut dialokasikan dana merupakan dua hal yang saling terkait satu dengan lainnya. Program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2024 dapat dilihat pada table 4.1 berikut ini:

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN KAB. ACEH JAYA
TAHUN 2024**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN						177.316.563.267,00							8.253.385.680,00			
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						177.316.563.267,00							8.253.385.680,00			
	5.02	KEUANGAN						177.316.563.267,00							8.253.385.680,00			
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	70.1 Nilai			-	7.528.633.307,00						68.6 Nilai	8.191.737.280,00			
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	12 Dokumen			-	13.490.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	OPD	3 Dokumen	18.658.700,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN		
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	8.425.000,00	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	OPD		13.648.700,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN		
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	5.065.800,00	Kab. Aceh Jaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	OPD		5.010.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN		
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	72 orang			-	6.098.574.203,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	OPD	72 orang	8.173.078.580,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN		
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				68 Orang/bulan	6.068.961.048,00	Kab. Aceh Jaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	OPD		8.143.465.180,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN		
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				1 Laporan	29.613.155,00	Kab. Aceh Jaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	OPD		29.613.400,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	14 Orang			-	20.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	ASN	4 Orang	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				0 Orang	20.000.000,00	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	ASN		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 persen			-	809.745.840,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	OPD	100 persen	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	5.474.600,00	Kab. Aceh Jaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	OPD		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				5 Paket	130.179.500,00	Kab. Aceh Jaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	OPD		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	47.282.000,00	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	OPD		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				1 Dokumen	1.080.000,00	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	OPD		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
5.02.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				1 Laporan	26.370.000,00	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	OPD		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
5.02.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	599.359.740,00	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	OPD		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
5.02.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 persen			-	197.132.364,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	OPD	100 persen	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
5.02.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	197.132.364,00	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	OPD		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
5.02.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	148 Unit			-	389.690.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	OPD	36 Unit	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
5.02.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				2 Unit	122.159.000,00	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	OPD		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
5.02.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				5 Unit	174.961.100,00	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	OPD		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
5.02.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				25 Unit	42.570.000,00	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	OPD		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
5.02.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	50.000.000,00	Kab. Aceh Jaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	OPD		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
2.	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	-	Tepat Waktu			-	169.281.879.565,00						Tepat Waktu	61.648.400,00	
5.02.02.2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	-	752 Dokumen			-	1.004.524.700,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	OPD	188 Dokumen	61.648.400,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
5.02.02.2.01.0001		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS														
			<i>Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun</i>				2 Dokumen	40.060.000,00	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	OPD		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
5.02.02.2.01.0002		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun</i>				2 Dokumen	42.965.000,00	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	OPD		38.466.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
5.02.02.2.01.0003		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi</i>				43 Dokumen	28.420.000,00	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	OPD		23.182.400,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi</i>				43 Dokumen	28.420.000,00	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	OPD		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD														
			<i>Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi</i>				43 Dokumen	19.838.000,00	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	OPD		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD														
			<i>Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi</i>				43 Dokumen	21.087.500,00	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	OPD		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD														
			<i>Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD</i>				2 Dokumen	69.692.500,00	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	OPD		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD														
			<i>Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD</i>				2 Dokumen	78.809.500,00	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	OPD		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran</i>				1 Dokumen	24.198.000,00	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	OPD		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
5.02.02.2.01.0013		Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota</i>				33 Orang	651.034.200,00	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	OPD		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
5.02.02.2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-	49448 Dokumen			-	170.800.150,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	OPD	12362 Dokumen	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
5.02.02.2.02.0001		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah</i>				5 Dokumen	103.734.550,00	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	OPD		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
5.02.02.2.02.0003		Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD</i>				164 Dokumen	24.991.400,00	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	OPD		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
5.02.02.2.02.0005		Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya</i>				1 Dokumen	15.415.750,00	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	OPD		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
5.02.02.2.02.0010		Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan														
			<i>Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan</i>				5 Dokumen	26.658.450,00	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	OPD		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.02.02.2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-	32 Dokumen			-	196.582.693,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	OPD	8 Dokumen	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota															
			<i>Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota</i>				6 Dokumen	169.071.953,00	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	OPD		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah															
			<i>Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah</i>				1 Dokumen	14.997.250,00	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	OPD		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah															
			<i>Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah</i>				1 Dokumen	6.989.890,00	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	OPD		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota															
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota</i>				43 Orang	5.523.600,00	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	OPD		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
5.02.02.2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	100 Persen			-	167.855.366.022,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	OPD dan Pemerintah Gampong	100 Persen	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan</i>				1 Laporan	164.562.892.700,00	Kab. Aceh Jaya, Krueang Sabee, Keutapang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA DESA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	OPD dan Pemerintah Gampong		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak</i>				1 Laporan	3.000.000.000,00	Kab. Aceh Jaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	OPD dan Pemerintah Gampong		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota</i>				1 Laporan	292.473.322,00	Kab. Aceh Jaya, Krueang Sabee, Keutapang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	OPD dan Pemerintah Gampong		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	-	4 Dokumen			-	54.606.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	OPD	1 Dokumen	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
	5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah</i>				1 Dokumen	54.606.000,00	Kab. Aceh Jaya, Krueang Sabee, Keutapang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	OPD		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
3.	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	-	WTP Opini			-	229.762.000,00						WTP Opini	0,00	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	100 Persen			-	229.762.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	OPD	100 Persen	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
1	2	3
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Pengguna
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rar
4.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAER
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengemb
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Peny
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana d

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Standar Harga yang Disusun				2 Dokumen	31.080.000,00	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	OPD		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah					1 Dokumen	6.600.000,00	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	OPD		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
	5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	3.120.000,00	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	OPD		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				1 Laporan	45.460.000,00	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	OPD		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				70 Laporan	78.000.000,00	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	OPD		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				5 Laporan	4.322.000,00	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	OPD		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Aceh Jaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	OPD		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				100 Dokumen	15.780.000,00	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	OPD		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				3 Laporan	40.400.000,00	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	OPD		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
4.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	3.84 Persen			-	276.288.395,00						3.84 Persen	0,00	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	3.84 persen			-	276.288.395,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	OPD dan Masyarakat	3.84 persen	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				5 Dokumen	13.378.300,00	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	OPD dan Masyarakat		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				2 Laporan	21.438.400,00	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	OPD dan Masyarakat		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah</i>				2 Unit	55.661.395,00	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	OPD dan Masyarakat		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah</i>				2 Laporan	33.104.800,00	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	OPD dan Masyarakat		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah</i>				2 Laporan	25.204.000,00	Kab. Aceh Jaya, Krueng Sabee, Keutapang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	OPD dan Masyarakat		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)														
			<i>Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya</i>				2 Obyek Pajak	71.985.000,00	Kab. Aceh Jaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	OPD dan Masyarakat		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah</i>				1 Dokumen	38.222.600,00	Kab. Aceh Jaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	OPD dan Masyarakat		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah</i>				2 Dokumen	17.293.900,00	Kab. Aceh Jaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	OPD dan Masyarakat		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN
			J U M L A H					177.316.563.267,00							8.253.385.680,00	

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Tahunan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya tahun 2024, disusun berdasarkan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023-2026 dalam menunjang tercapainya target dan sasaran pembangunan daerah. Selain itu Renja-SKPK BPKK Aceh Jaya juga merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang mempunyai fungsi untuk menentukan arah dan rencana serta memperhatikan sumber daya yang ada dengan harapan dapat menjadi acuan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan yang sumber pembiayaannya berasal dari APBK Aceh Jaya Tahun Anggaran 2024.

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya sebagai salah satu sarana tata Kelola organisasi yang dapat dipergunakan untuk :

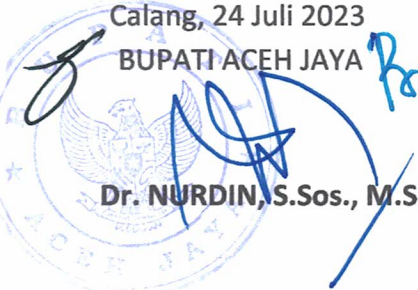
- a. Menjaga konsistensi antara perencanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran dengan pelaksanaan serta dokumen perencanaan;
- b. Merumuskan program dan sasaran kebijakan agar sesuai dengan arah yang telah ditetapkan;
- c. Merencanakan program kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi dan merencanakan alternatif sumber pembiayaan;
- d. Mengalokasikan anggaran untuk mendukung target capaian program dan kegiatan yang telah disusun; dan
- e. Menentukan indikator kinerja dan tingkat capaian strategis.

Dengan tersusunnya Renja BPKK Aceh Jaya ini, maka rekomendasi untuk pengelola keuangan Tahun 2024 sebagai berikut :

- a. Melakukan verifikasi dan pendampingan kepada para pengelola keuangan mulai dari penyusunan program, perencanaan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan;

- b. Melakukan koordinasi dan membangun komunikasi antar pegawai, antar bidang dan antar Perangkat Daerah sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan keuangan dan aset daerah; dan
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja BPKK Aceh Jaya yang dijabarkan dengan mewujudkan dalam bentuk program, kegiatan, sub kegiatan pada masing-masing bidang.

Seluruh rangkaian program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja ini merupakan dokumen pendukung pencapaian kinerja pada Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Rencana Pembangunan Kabupaten (RPK) Aceh Jaya Tahun 2023-2026.

Calang, 24 Juli 2023
BUPATI ACEH JAYA

Dr. NURDIN, S.Sos., M.Si

